



---

## Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya

Yusri<sup>1\*</sup>, Cut Delsie Hasrina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

\*Email korespondensi: yusrim1@gmail.com

---

Diterima 2 September 2018; Disetujui 17 Oktober 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018

**Abstract:** *Internal control is important thing in running a system both in government and private sector. This study was using primary data from the interviews with employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) office in Nagan Raya District. The analysis method used was descriptive analysis method by describing the findings obtained from the study. The results of this study indicated that the application of an internal control system for the acquisition of Regional Revenue of Nagan Raya District was sufficient because sufficient segregation of duties has been carried out, the forms used in tax payments have contained reliable information, responsibilities given and documents related to local tax revenues clear and coordinated.*

**Keywords:** *internal control, local revenue*

**Abstrak:** Pengendalian internal merupakan hal penting dalam menjalankan suatu sistem baik di pemerintahan maupun swasta. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan karyawan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nagan Raya. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan menjabarkan hasil temuan yang didapat dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya telah memadai karena telah dilakukan pemisahan tugas yang cukup, formulir yang digunakan dalam penyetoran pajak telah memuat informasi yang handal, tanggung jawab yang diberikan dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah yang jelas dan terkoordinir.

**Kata kunci :** *pengendalian internal, pendapatan asli daerah*

Sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu entitas, baik milik pemerintah maupun swasta untuk dapat bersaing dengan sehat dan sempurna. Hal ini dikarenakan informasi sangat membantu manajer dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan,

penganggaran, bahkan untuk menyediakan informasi yang mendukung dalam pengambilan suatu keputusan yang bersifat strategis.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmed Atef Oussii (2018), mengenai hubungan antara fungsi audit internal (IAF), mengungkapkan bahwa

kualitas pengendalian internal sangat signifikan dan terkait secara positif dengan kompetensi IAF, tingkat jaminan pengendalian mutu audit internal, proses tindak lanjut, dan keterlibatan komite audit dalam meninjau program dan hasil audit internal. Selanjutnya Sari et al., (2017), melakukan penelitian yang berfokus pada efek audit internal dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas layanan publik (BLU) di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan variabel independen, audit internal (diwakili oleh pihak yang terlibat langsung dalam manajemen keuangan) tidak memberikan pengaruh dan tidak dapat meningkatkan akuntabilitas dan sistem pengendalian internal (diwakili oleh SPI/unit pengendalian internal) memberikan pengaruh dan dapat meningkatkan akuntabilitas.

Nie (2017), melakukan penelitian tentang analisis pengembangan pengendalian internal dan audit internal PT CIMC. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa CIMC menggabungkan pengendalian internal dan audit internal bersama untuk menerapkan secara kreatif, yang memastikan pengembangan perusahaan yang sehat dan stabil. Kombinasi dari pengendalian internal CIMC dan audit internal memberikan contoh yang baik untuk perusahaan lain, dan sistemnya sendiri secara konstan dimodifikasi dan disempurnakan pada saat yang sama.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nagan Raya adalah objek yang diambil dalam penelitian ini. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemungutan, penetapan, menggali

potensi, objek pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah, melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, termasuk, dana bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lainnya pendapatan yang sah. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya tersebut diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control Systems*) yang kuat.

Tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya antara lain: meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan organisasi, meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemetaan potensin objek pajak daerah. Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan mudah menerapkan internal control sebagai instrumen pengendalian untuk organisasi itu sendiri, dan tidak tertutup kemungkinan dapat ditingkatkan di unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan.

Oleh sebab itu diperlukan adanya prosedur yang tepat dalam mengelola sistem informasi akuntansi agar dapat sesuai dengan arah, kebijakan dan program Kabupaten Nagan Raya pada masa yang akan datang guna untuk tercapai tujuan kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal (*Internal Control*) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya”.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nagan Raya. Disamping itu data juga diperoleh dari penelusuran perpustakaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara terhadap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya, serta meneliti dokumen-dokumen di perpustakaan, buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan

### Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan melakukan perbandingan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan Sistem Pengendalian Intern yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya. Kemudian menguji ketaatan aturan Sistem Pengendalian Intern dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah, formulir yang digunakan, dan pemisahan tugas serta menguji efektivitas sistem pengendalian internal pada penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

### Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Variabel bebas (*Indevenden Variabele*) adalah merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent Variable*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*Independent Variabele*) adalah pengendalian internal (X). Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut (Peraturan Pemerintah, n.d.) Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut: "Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah".

- b. Variabel terikat (*Devendent Variable*) adalah variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pengukuran Kinerja yang disimbolkan (Y).

Kinerja adalah setiap instansi yang didirikan dengan satu tujuan tertentu, oleh karena itu setiap kegiatannya akan ditujukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mangkunegara, Anwar Prabu (2000 : 164) "kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya"

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan daerah suatu daerah apabila merujuk pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat berasal dari berbagai sumber pendapatan. Kabupaten Nagan Raya memperoleh pendapatan dari berbagai jenis pajak meliputi : Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Taanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 182 ayat 2 UU No 28 tahun 2009, pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Sedangkan untuk jenis retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga katagori meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah yang meliputi pajak dan ristribusi Kabupaten Nagan Raya untuk tiga tahun terakhir. Pajak Daerah sebesar Rp 15.422.502.000 pada tahun 2015 meningkat secara cepat menjadi Rp.38.824.500.000 pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 Rp 22.546.369.793 mengalami penurunan yang dratis. Untuk jenis Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya juga mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebesar Rp 7.844.996.700 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp 11.319.996.700 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp 7.304.996.700.

Berdasarkan nilai pendapatan yang tidak stabil ini perlu dilakukan pengendalian dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan terintegrasi, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kenaikan dan penurunan penerimaan

keuangan daerah dapat terjadi karena berbagai faktor dan kondisi baik yang terjadi secara alami, ada oknum yang mempermainkan pendapatan tersebut, atau adanya kesalahan dalam menggunakan kewenangan yang di berikan kepada para aparatur setempat, sehingga dengan mudah mempermainkan tata kelola keuangan di daerah tersebut.

**Tabel 1. Daftar realisasi Pajak dan Retribusi Kab. Nagan Raya 2015-2017**

Tahun	Pajak	Retribusi
2015	15.422.502.000	7.844.996.700
2016	38.824.500.000	11.319.996.700,-
2017	22.546.369.793,-	7.304.996.700

Sumber : BPKAD Kab. Nagan Raya, 2017

Untuk memperkuat pengendalian internal kontrol di Kabupaten Nagan Raya agar pendapatan asli daerah diperoleh sesuai dengan yang diharapkan sangat cocok apabila diterapkan menurut teori yang dikembangkan oleh Ahmed Atef Oussi dan Neila Boulila Taktak tahun 2018. Mereka menggunakan model regresi untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara karakteristik IAF dan kualitas pengendalian internal. Temuan-temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas pengendalian internal sangat signifikan dan terkait secara positif dengan kompetensi IAF, tingkat jaminan pengendalian mutu audit internal, proses tindak lanjut, dan keterlibatan komite audit dalam meninjau program dan hasil audit internal. Temuan memiliki implikasi signifikan bagi IAF yang ingin meningkatkan efektivitas mereka, dengan mengenali dampak karakteristik IAF pada kualitas pengendalian internal.

Maka dengan kondisi yang terkini, sangat dibutuhkan instrumen pengendalian internal control yang kuat, untuk membangun atau penguatan kualitas audit dan penguatan internal kontrol dalam sebuah organisasi, agar terhindar dari kecurangan (*froud*). Demikian pula menyangkut dengan internal kontrol sebagai mana telah dilakukan selama ini relatif hasilnya sangat memuaskan, walau pun masih ada kendala yang tidak signifikan, hal ini sesuai dengan teori oleh (Nie, 2017), menganalisis pengembangan pengendalian internal dan audit internal PT CIMC, kita dapat melihat hubungan antara keduanya dari penghambatan hingga fusi jelas.

Khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sangat efektif untuk melakukan pengawasan setelah penerapan ke dua teori untuk menjadi pola dasar pengawasan internal kontrol setiap transaksi-transaksi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pengelolaan yang transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sistem pengendalian intern terhadap prosedur penerimaan pendapatan asli daerah, dapat diarahkan pada penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan daerah yang meliputi: Pajak Perhotelan dan Restoran, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (Permukiman), Retribusi Perparkiran. Adapun beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk penyelenggaraan tata kelola yang lebih baik adalah:

#### 1. Pemisahan Tugas yang jelas.

Pemisahan tugas dalam penerimaan pendapatan daerah melalui penerimaan Pajak/retribusi daerah tersebut telah memberikan kepastian pekerjaan tertentu dilakukan dengan tepat oleh

petugas/staf yang sesuai dengan keahliannya.

#### 2. Formulir

Dari isi formulir yang digunakan dalam penyetoran pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa transaksi tersebut di atas telah dicatat dan divalidasi oleh petugas yang memadai.

#### 3. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya juga telah memadai. Hal ini tercermin dari tanggung jawab yang diberikan dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jelas, sistimatis dan terkoordinir.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern (*Intern Control*) terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan secara efektif, Hal ini tercermin antara lain:

1. Penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya telah memadai karena telah dilakukan pemisahan tugas yang cukup, formulir yang digunakan dalam penyetoran pajak telah memuat informasi yang handal, tanggung jawab yang diberikan dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah yang jelas dan

terkoordinir.

2. Penerapan sistem pengendalian intern atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah memadai dan sudah berjalan efektif, sedangkan pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakkar.
- Ahmed Atef Oussii, N. B. T. (2018). The impact of internal audit function characteristics on internal control quality. *Managerial Auditing Journal*, *https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1579*, 10(3), 389–397. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50848>.
- Nie, J. (2017). When Internal Control Meets Internal Audit: Conflict or Combine? *Open Journal of Accounting*, 6(2), 43–51. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2017.62004>
- Peraturan Pemerintah, N. 08 T. 2006. (n.d.). Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
- Sari, N., Ghozali, I., Achmad, T., Republik Indonesia, Petrovits, C., Shakespeare, C., Republik Indonesia. (2017). The effect of internal audit and internal control system

on public accountability: The emperical study in Indonesia state universities. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 1–27. <https://doi.org/10.2308/accr.00000012>

Undang-Undang No 28, Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

#### ▪ How to cite this paper :

Yusri, Y., & Hasrina, C. D. (2018). Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 150–155.